



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN SIDANG 2010
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- YTH. - Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;**
- Saudara Wakil Bupati Kabupaten Lamongan;**
 - Saudara Anggota Muspida Kabupaten Lamongan;**
 - Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan;**
 - Saudara Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan para Wartawan dan para undangan yang saya muliakan.**

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti sidang lanjutan dalam keadaan sehat wal'afiat guna penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 dengan penuh rasa kekeluargaan.

Mudah-mudahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, guna membangun Kabupaten Lamongan kearah yang lebih baik, serta mewujudkan masyarakat Lamongan yang semakin maju, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran, Fraksi-fraksi dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungannya bersama Eksekutif membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam suasana kemitraan yang mendalam. Kita menyadari bahwa hanya dengan kemitraan dan kebersamaan antara Legislatif dan Eksekutif akan mewujudkan keutuhan dalam setiap kebijakan, arah dan cita-cita Lamongan kedepan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Saudara Drs. H. Sutardjo Syafi'ie, MH. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Yang Terhormat Saudari Dra. Hj. Zulaikhah, Ak. dan Saudara

- Nipbianto, SE dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Yang Terhormat Saudara H. Nurul Kholik, SE. dari Fraksi Partai Amanat Nasional;
 4. Yang Terhormat Saudara Kasnoto, SH. dari Fraksi Partai Golongan Karya.
 5. Yang Terhormat Saudara Hendra Suwardana dari Fraksi Partai Demokrat.
 6. Yang Terhormat Saudara H. Moh. Amir, SE. dan Drs. H. Shoib dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama.
 7. Yang Terhormat Saudari Hj. Nikmatin Fauziah, SH. dari Fraksi Patriot Pembangunan Nurani.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya perkenalkanlah saya menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, pemikiran, saran dan himbauan yang terhormat Fraksi-Fraksi Dewan yang dirangkum dalam bidang-bidang, sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

I. Pendapatan Asli Daerah

1. Terhadap himbauan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menertibkan ijin usaha RPH swasta, akan ditindaklanjuti dengan pendataan dan verifikasi perijinan bagi RPH yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan untuk mengawasi perkembangan RPH di Lamongan juga diharapkan untuk memantau kualitas daging yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar memenuhi standart aman, sehat, utuh, dan halal.

2. Untuk saran tentang pengelompokan kode rekening pendapatan dari PT. LIS agar dimasukkan dalam komponen Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD akan ditindaklanjuti.
3. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat mengenai saham PT. LIS dapat disampaikan bahwa pemegang saham PT LIS adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan dan PT. PWU yang merupakan BUMD Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dimana saham PT: PWU yang disertakan sampai saat ini baru berupa lahan seluas 26 hektar atau belum memenuhi komposisi 45 % sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2007.
4. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan dasar hukum penetapan Pendapatan Daerah dalam RAPBD 2011, hal tersebut akan diperhatikan dan disesuaikan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.
5. Terkait dengan rencana penerimaan RS. Ngimbang, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terpenuhi disamping itu masih dalam tahap awal pelaksanaan operasionalisasinya.
6. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait modal dasar PD Pasar Kabupaten Lamongan dapat disampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 ditetapkan sebesar *175 milyar rupiah*, sedangkan modal disetor adalah sebesar *98 milyar 687 juta 293 ribu 97 rupiah* yang berupa asset tanah, gedung dan

bangunan, angkutan dan alat kantor. Terkait dengan kontribusi PD Pasar, dapat disampaikan bahwa dengan berubahnya menjadi Perusahaan Daerah, maka penerimaan-penerimaan yang didapat dari aktivitas pasar yang dikelola, digunakan secara langsung untuk operasional PD Pasar. Sesuai dengan proyeksi Laporan Rugi Laba Tahun 2010, target penerimaan bagi hasil dari PD Pasar diperkirakan sebesar *80 juta rupiah*.

7. Atas harapan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait penertiban dan penataan reklame, hal ini telah dilakukan pemerintah daerah dalam menentukan letak reklame khususnya di kawasan dalam kota, sehingga kawasan perkotaan menjadi lebih semarak dan menghidupkan atmosfer kota sebagai pusat bisnis dan perekonomian masyarakat.
8. Atas harapan Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan penetapan target Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan yang masih dimungkinkan untuk ditingkatkan dengan memperhatikan pengembangan obyek baru yakni rumah kost, jasa katering/jasa boga, pabrik roti dan usaha jasa boga lainnya, serta kenaikan TDL, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
9. Terhadap pemahaman Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama atas target penurunan penerimaan BPHTB, dijelaskan bahwa BPHTB pada Tahun 2011 pemungutannya dilakukan oleh daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak mendapatkan bagi hasil pemerataan dari pemerintah pusat yang tahun ini kita mendapatkan sebesar 2 milyar 981 juta sehingga penerimaan tahun 2011 murni dari

potensi Kabupaten Lamongan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB, telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan Notaris, Camat dan BPN.

10. Terkait dengan koreksi Fraksi Golongan Karya mengenai penerimaan jasa giro disampaikan terima kasih, penerimaan jasa giro direncanakan sebesar *1 milyar 250 juta rupiah*.
11. Terkait dengan beberapa koreksi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani didalam Dokumen Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2011 disampaikan terima kasih dan akan dilakukan pembetulan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2011.
12. Harapan Fraksi Partai Demokrat agar PAD Tahun Anggaran 2011 ditingkatkan lagi sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah, dapat disampaikan bahwa penetapan target 2011 telah diperhitungkan secara maksimal sesuai potensi daerah dan akan diperhatikan dalam pelaksanaannya.
13. Tentang target PT. LIS pada perubahan APBD Tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa target tersebut baru akan dibayar pada bulan Desember 2010 sebesar 450 juta rupiah sedangkan target untuk Tahun 2011 masih tetap dan penerimaan PT LIS tersebut bukan bagian laba, akan tetapi merupakan sumbangan pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
14. Terkait saran agar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Tempat Pelelangan, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir lebih dinaikkan targetnya, dapat disampaikan terutama terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) targetnya telah memperhitungkan proyeksi potensi pembangunan tahun 2011

terutama untuk gedung-gedung perkantoran dan rumah mewah. Demikian pula dengan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

15. Terhadap saran agar dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, hal ini sudah sejalan dengan upaya eksekutif dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD dengan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan dari masing-masing BUMD dan pembinaan SDM secara rutin.
16. Untuk saran dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan kontribusi pengelolaan pabrik pupuk yang mengalami penurunan sebesar 120 juta rupiah, hal ini disebabkan PT. Ladang Hijau Gresik selaku pengelola pabrik pupuk organik tidak bisa memasarkan produksinya secara maksimal menyesuaikan kuota yang ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik.
17. Terhadap saran Fraksi Partai Demokrat agar melakukan sosialisasi hukum terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah setelah ditetapkan menjadi Perda, hal tersebut akan dilaksanakan termasuk melakukan koordinasi dengan KPP Pratama dan Kanwil Dirjen Pajak terhadap pengelolaan pemungutan PBB dan BPHTB.
18. Atas usulan untuk menagih kepada investor tentang kontribusi PAD atas dana pengganti bangunan Pasar Agrobis Babat, telah dilakukan beberapa kali penagihan kepada pengelola Pasar Agrobis Babat hingga saat ini baru terealisasi sebesar 1 milyar rupiah.
19. Atas saran yang disampaikan dalam upaya meningkatkan PAD dengan melakukan Update data potensi, hal tersebut telah kami lakukan dengan pendataan pada setiap obyek pajak dan retribusi

secara berkala. Demikian pula dengan akan berakhirnya kerjasama pengelolaan reklame, hal tersebut akan dikaji kembali.

20. Terhadap mekanisme pelimpahan Pajak dan Retribusi dari Pusat maupun Propinsi yang menjadi Pajak dan Retribusi Daerah terutama pada BPHTB, hal ini telah dilakukan regulasinya dengan menyusun raperda baru dan peraturan pelaksanaannya, mengikutsertakan berbagai pelatihan dan diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan propinsi, serta mengirimkan tenaga untuk magang di KPP Pratama Cabang Lamongan.
21. Terkait dengan penyelamatan asset kekayaan daerah utamanya penyelesaian pembelian barang bekas alat berat dari Kalimantan dijelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan pengambilalihan asset berupa asset tanah yang ada di Surabaya dan Gresik, serta tanah di Kecamatan Solokuro. Sedangkan untuk permasalahan dana di Pabrik Pupuk Maharani tetap diupayakan penyelesaiannya.
22. Atas pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama terhadap penurunan target penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil pada Tahun 2011, dapat dijelaskan bahwa untuk biaya Cetak Akta Kelahiran pada Tahun 2011 sudah tidak dipungut.
23. Terhadap pernyataan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani mengenai Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2011 mengalami kenaikan yang berasal dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan, hal tersebut bukan semata membebani masyarakat kecil yang berobat, namun atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan,

disamping itu kenaikan retribusi pelayanan kesehatan dari RS Ngimbang.

24. Atas permintaan penjelasan mengenai alasan tidak adanya peningkatan pada proyeksi laba PD. Bank Daerah Lamongan, dapat dijelaskan bahwa bagian laba atas penyertaan modal PD. Bank Daerah Lamongan pada Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sama dengan tahun anggaran 2010, namun untuk target secara riil akan dialokasikan dalam perubahan APBD Tahun 2011 sesuai dengan Laporan Keuangan PD Bank Daerah pada akhir tahun 2010 setelah dilakukan audit.
25. Terkait penurunan penerimaan lain-lain PAD yang sah dari kontribusi penjualan kios, los gudang dan outlet, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2011 sudah tidak ada lagi penerimaan dari Pasar Agrobis Babat.
26. Terkait dengan harapan kenaikan PAD 2011 minimal 5% dari Tahun 2010 mengikuti asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, dapat disampaikan bahwa kenaikan PAD secara akumulasi kenaikannya 1,24%. Untuk menganalisa PAD harus dilihat sifat dari penerimaan PAD yang meliputi pajak daerah naik sebesar 16,65%, retribusi daerah naik sebesar 4,15% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar (5,24%). Penurunan pada lain-lain pendapatan asli daerah tersebut merupakan penerimaan daerah yang bersifat insidentil sehingga secara akumulasi potensi penerimaan pajak dan retribusi peningkatannya dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi.

27. Terkait Perda tentang Retribusi Daerah yang telah disetujui dan ditetapkan dalam pelaksanaannya akan dioptimalkan dan diawasi secara ketat sehingga PAD naik secara signifikan.

II. Dana Perimbangan

1. Terhadap saran dan koreksi Fraksi PDI Perjuangan terkait pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai agar dimasukkan dalam kelompok pendapatan dana perimbangan disampaikan terima kasih dan akan ditindaklanjuti oleh eksekutif.
2. Terhadap saran Fraksi Partai Demokrat agar Eksekutif lebih pro aktif melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi, hal tersebut telah dilakukan koordinasi baik dengan pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka untuk memperoleh informasi-informasi dana perimbangan yang mencerminkan kondisi dan potensi Kabupaten Lamongan.

III. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait dengan target bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 yang masih disesuaikan dengan ketetapan target Tahun 2010, hal ini masih menunggu ketetapan target dari Pemerintah Propinsi dan akan dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD 2011.
2. Terhadap proyeksi penurunan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi masih ditargetkan tetap, dan penetapan target bakunya akan disesuaikan pada perubahan anggaran Tahun 2011. Sedangkan penurunan sebesar 0,28% terkait penerimaan

pajak air tanah, sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 beralih menjadi obyek pajak daerah.

B. BELANJA DAERAH

Dinas pendidikan

1. Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap alokasi dana DAK Bidang Pendidikan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2010 mengalami keterlambatan pelaksanaan, dikarenakan Juknis DAK Bidang Pendidikan yaitu Permendiknas Nomor 18 dan Nomor 19 Tahun 2010 baru diterima tanggal 2 Nopember 2010. Dengan demikian secara nasional dana DAK Pendidikan untuk tahun anggaran 2010 belum bisa dilaksanakan, sehingga akan dilaksanakan pada tahun 2011. Adapun realisasi dana sebesar 17,989 milyar merupakan realisasi termin pertama dana DAK yang ditransfer dari Kas Negara ke Kas Daerah.
2. Atas permohonan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai besaran jumlah bantuan yang diberikan pada SDLB/SLB adalah berdasarkan jumlah siswa pada SDLB/SLB tersebut, karena bantuan tersebut peruntukannya digunakan untuk belanja makan dan minum siswa, sehingga jumlah bantuan tidak sama antara satu dengan yang lain.
3. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pada Dinas Pendidikan merupakan pembinaan keolahragaan bagi pelajar, sedangkan pembinaan keolahragaan secara umum ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

4. Atas permohonan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi dan Non Sertifikasi Guru dapat dijelaskan bahwa dana tersebut telah direalisasikan dan ditransfer pada rekening masing-masing guru yang bersangkutan pada bulan Juli 2010, sedangkan untuk tahap kedua direncanakan ditransfer setelah pemerintah daerah menerima realisasi dari pemerintah pusat dimana sampai dengan saat ini belum diterima dari pemerintah pusat.
5. Tentang Rapelan Kenaikan Gaji PNS dan tunjangan beras yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat, hal tersebut akan segera diproses realisasinya.
6. Mengenai permohonan dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai pembebasan semua bentuk pungutan pendidikan, pemerintah daerah secara bertahap akan membantu membiayai kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga diharapkan pungutan yang ada di sekolah-sekolah dapat diminimalisir.
7. Perbaikan/ Rehabilitasi gedung sekolah negeri swasta akan diupayakan sesuai skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta diupayakan dengan pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun propinsi.
8. Tunjangan untuk guru-guru swasta dan penyediaan buku-buku pelajaran akan kami perhatikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
9. Terkait dengan penyempurnaan sistem belajar mengajar dan rekrutmen siswa pada sekolah RSBI akan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada standar penyelenggaraan RSBI.

Selanjutnya mengenai biaya sekolah disesuaikan dengan kebutuhan Biaya Operasional dan Biaya Investasi dengan tetap memperhatikan kemampuan orang tua siswa.

10. Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Golongan Karya mengenai besaran Biaya Umum, dapat dijelaskan bahwa Besaran Biaya Umum (BU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan adalah mengacu pada Standar Analisa Belanja Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Adapun kegiatan fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada lembaga pendidikan swasta adalah merupakan Biaya Umum untuk pelaksanaan penyaluran bantuan. Sedangkan anggaran Hardiknas senilai 30 juta rupiah adalah untuk menopang rangkaian kegiatan Hardiknas termasuk Pameran Pendidikan. Kegiatan Pembinaan bakat, minat dan pemberian reward adalah kegiatan untuk memacu bakat dan prestasi siswa dalam peningkatan kualitas pendidikan.
11. Untuk pengadaan buku-buku sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai dengan peningkatan sistem pengawasan untuk memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar baku mutu serta dalam hal penyalurannya.
12. Atas permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai rencana alokasi belanja langsung pada SKPD Dinas Pendidikan yang mengalami kenaikan sebesar 94,56 persen dibanding tahun 2010 dapat disampaikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 baru dapat dilaksanakan di tahun 2011, sehingga peningkatan alokasi anggaran belanja langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

13. Atas ketidakcermatan dalam mengalokasikan anggaran akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dengan mengadakan beberapa penyempurnaan.
14. Mengenai permohonan penjelasan dari Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap kinerja guru setelah mendapatkan tunjangan sertifikasi diharapkan para guru lebih termotivasi sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah.
15. Tunjangan kesejahteraan dalam belanja tidak langsung sebesar 453 juta Rupiah diperuntukkan untuk Tunjangan Kesejahteraan bagi PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Non Edukatif, serta Kepala Tata Usaha atau Ka. TU SMPN, SMAN dan SMKN berdasarkan beban kerja mendapatkan tambahan penghasilan.
16. Terhadap kegiatan Pembinaan Perpustakaan dialokasikan untuk penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat.

Dinas Kesehatan

1. Atas permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama mengenai alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai, dapat disampaikan bahwa penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang diwujudkan dengan pembangunan Poliklinik Paru di Puskesmas Sekaran, Tlogosadang dan Kembangbahu, pengadaan alat kesehatan untuk RS Ngimbang, serta program

promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat. Terhadap laporan realisasi anggaran kegiatan DBH Cukai Tembakau, telah dilakukan evaluasi pelaporan penggunaan anggaran setiap 6 bulan sekali.

2. Terkait dengan operasionalisasi Rumah Sakit Ngimbang yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Demokrat akan dioperasionalkan pada tahun 2011. Untuk tenaga medis dan peralatan alat kesehatan dan alat kedokteran telah dipersiapkan. Selanjutnya untuk kelengkapan secara bertahap akan dipenuhi seiring dengan aktivitas pelayanan yang akan ditingkatkan. Sedangkan tentang pemberian insentif dan tunjangan profesi bagi dokter-dokter, khususnya dokter spesialis, akan tetap diperhatikan.
3. Atas koreksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap penggunaan dana DAK khususnya pada belanja honorarium pegawai dan perjalanan dinas dapat dijelaskan bahwa untuk belanja administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah biaya umum yang merupakan dana pendamping yang bersumber dari APBD.
4. Terkait dengan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor sebagaimana disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dapat dijelaskan bahwa anggaran kegiatan tersebut sebagian besar digunakan untuk jasa kebersihan Rumah Sakit Ngimbang yang dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk jasa kebersihan di Dinas Kesehatan dan gudang farmasi kesehatan disediakan 6 orang tenaga kebersihan yang besaran honor tiap bulannya sudah berpedoman pada Standar Analisa Belanja tahun

2011. Selanjutnya mengenai himbauan terhadap peningkatan pelayanan rumah sakit dan Puskesmas-puskesmas yang ada di desa-desa akan menjadi perhatian Eksekutif.
5. Terhadap himbauan Fraksi Partai Golongan Karya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Puskesmas yang ada di Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sesuai bestek, sehingga dapat terjaga kualitasnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
 6. Atas permohonan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait adanya kenaikan belanja langsung yang bersifat rutin, hal tersebut dipergunakan untuk menunjang operasionalisasi RS Ngimbang.

RSD. Dr. Soegiri

1. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang rincian obyek belanja bahan pakai habis, bahan material dan jasa kantor kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa :
 - Belanja bahan pakai habis berupa Alat Kedokteran, Laboratorium, Bahan Pemaketan, dan Radiologi.
 - Belanja Bahan Material berupa Bahan Obat-obatan dan Darah PMI.
 - Belanja Jasa Kantor berupa Jasa Pelayanan (Jasa Medis).
2. Atas perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap upaya peningkatan pelayanan, hal ini juga menjadi perhatian kami.

Keluhan dan rasa tidak puas dari masyarakat akan kita gunakan sebagai acuan untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa Rumah Sakit Dr. Soegiri selama ini layanan terhadap masyarakat miskin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu untuk tenaga medis dan non medis akan diupayakan untuk lebih disiplin dan lebih baik dalam memberikan pelayanan.

3. Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang penggunaan dana yang berasal dari bagi hasil cukai dipergunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan utamanya yang terkait dengan dampak merokok dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan dan kedokteran.
4. Harapan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai perlunya bagi RSUD Dr. Soegiri memiliki peralatan medis CT-SCAN disampaikan terimakasih. Perlu diinformasikan bahwa peralatan dimaksud telah diusulkan bantuan lewat APBN Tahun 2011.
5. Terhadap permohonan Fraksi Partai Demokrat tentang alokasi belanja langsung dapat disampaikan bahwa kenaikan belanja langsung tersebut menyesuaikan kenaikan pendapatannya karena RSD. Dr. Soegiri telah melaksanakan sistem BLUD. Disamping itu terdapat juga kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan DAK.

Dinas PU Bina Marga

1. Atas himbauan dan harapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur

jalan dan jembatan, hal tersebut sudah menjadi komitmen dan harapan kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, dan apabila terjadi penyimpangan akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Atas himbauan Fraksi Partai Golongan Karya tentang Biaya Umum, hal ini perlu disampaikan bahwa penentuan besaran Biaya Umum telah disesuaikan dengan Standar Analisa Belanja Tahun 2011.

Sedangkan untuk menentukan jenis konstruksi dalam pemeliharaan jalan agar kualitas lebih terjaga, pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan kondisi jalan serta struktur tanah.

3. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama berkaitan dengan rehabilitasi jalan yang terkesan hanya bersifat formalitas dan kualitas pengerjaan yang sangat rendah dapat dijelaskan bahwa sasaran kegiatan pemeliharaan rutin jalan-jalan kabupaten adalah untuk jalan yang tingkat kerusakannya hanya di bawah 15 %. Hal ini dimaksudkan guna mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang.

Sementara untuk jalan yang tingkat kerusakannya diatas 25%, dilakukan pemeliharaan berkala atau peningkatan. Perlu disampaikan bahwa pelaksanaan pemeliharaan rutin selalu melebihi target dari panjang jalan yang direncanakan. Dalam tahun 2010 mengalami musim penghujan lebih awal dan hampir sepanjang tahun, sehingga berdampak terhadap semakin cepatnya kerusakan jalan. Adapun terhadap usulan pembangunan jalan poros desa Sumberdadi-Sumberkerep Kecamatan Mantup, disampaikan terima kasih dan diperhatikan sesuai dengan skala prioritas.

Dinas PU Pengairan

1. Terhadap saran dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan pengerukan saluran sungai atau waduk telah diprogramkan pada musim kemarau, namun kenyataannya pada tahun ini terjadi musim hujan kembar (hujan sepanjang tahun), sehingga menjadikan problem pada setiap kegiatan utamanya pada kegiatan – kegiatan dibidang pengairan.

Adapun terhadap pengerukan, hal ini disesuaikan dengan besaran volume dikarenakan pelaksanaan pengerjaan berdasar pada Kontrak Unit Price yaitu berpedoman pada harga satuan dan volume yang dikerjakan.

2. Mengenai permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Golongan Karya tentang kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dapat disampaikan bahwa kegiatan tersebut digunakan untuk pendamping bantuan PISP dari pemerintah pusat dimana pada tahun 2011 Kabupaten Lamongan direncanakan mendapat bantuan sebesar 3 milyar 97 juta 238 ribu 400 rupiah untuk pembangunan fisik 27 obyek yang tersebar pada 12 kecamatan. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan dana penunjang perjalanan untuk dalam dan luar daerah guna peningkatan pengawasan kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya terhadap saran tentang sasaran pengerukan dan pembangunan waduk, hal tersebut menjadi perhatian eksekutif dengan lebih menyempurnakan dalam proses perencanaan kegiatan.
3. Terhadap permintaan penjelasan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang lokasi pengerukan waduk, dapat disampaikan

bahwa tahun 2010 lokasi pengerukan adalah Waduk Palangan Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah, sedangkan yang diusulkan pada tahun 2011 adalah pengerukan Kali Plalangan Desa Tanjung Kecamatan Lamongan. Untuk usulan pembangunan kali di Desa Jubel Lor Kecamatan Sugio - Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk serta kali Desa Turi - Kemlagigede - Kemlagi Lor Kecamatan Turi, disampaikan terima kasih dan menjadi perhatian.

Dinas PU Cipta Karya

1. Untuk saran pembangunan Gedung DPRD sebagaimana yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, hal ini dengan mempertimbangkan adanya jumlah alat kelengkapan yang semakin berkembang, baik terhadap jumlah komisi, fraksi, badan kehormatan, dan alat kelengkapan dewan, sehingga perlu adanya gedung yang mampu menampung kebutuhan tersebut.
2. Atas usulan Fraksi Partai Golongan Karya tentang penambahan pemasangan LPJU baru untuk ditempatkan di perbatasan Desa Dagan Kecamatan Solokuro sampai dengan pertigaan Desa Drajat Kecamatan Paciran, untuk tahun 2011 direncanakan akan dilaksanakan pemasangan 5 unit PJU dan selanjutnya akan ditingkatkan secara bertahap.
3. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, bahwa penggunaan dana rutin adalah untuk pengadaan peralatan kebersihan pertamanan, pengadaan bibit tanaman dan pemeliharaan taman-taman di kota Lamongan. Adapun untuk

pemeliharaan taman-taman di RTH Gembong-Pucuk-Paji-Lamongan-Pandanpancur sudah kami laksanakan secara insidentil dan akan lebih dioptimalkan lagi dalam pelaksanaan selanjutnya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Disampaikan terimakasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas perhatiannya terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Terhadap rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten Lamongan, hal ini telah menjadi agenda penyusunannya. Terkait dengan penyusunan RPJMD dapat disampaikan bahwa saat ini dalam persiapan Musrenbang rancangan RPJMD yang merupakan tahapan akhir dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

Dinas Perhubungan

1. Atas permohonan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan alokasi anggaran kegiatan intensifikasi parkir berlangganan dipergunakan untuk intensifikasi berupa pelaksanaan undian berhadiah parkir berlangganan, biaya monitoring pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan parkir dan belanja pakaian kerja lapangan para jukir, sedangkan mata anggaran penyediaan jasa tenaga administrasi diperuntukkan honorarium tenaga jukir, tenaga honorer tidak tetap, tenaga honorer pengamanan palang pintu KA, satpam dan penjaga malam kantor.
2. Atas himbauan Fraksi Golongan Karya mengenai pembenahan dan pemeliharaan terhadap *traffic light* yang berada di Kabupaten

Lamongan akan ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

3. Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama mengenai Anggaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada tahun anggaran 2011, dapat dijelaskan bahwa kenaikan alokasi anggaran tahun 2011 dipergunakan untuk belanja cetak karcis dan stiker parkir berlangganan.

Mengenai insentif pemungutan retribusi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diprosentasekan dari keseluruhan retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Sedangkan belanja bagi hasil retribusi parkir berlangganan merupakan bagi hasil pengelolaan parkir berlangganan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Lamongan dengan Pemerintah Propinsi Jatim dan Kepolisian Resort Lamongan.

Badan Lingkungan Hidup

1. Atas saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap upaya penyelesaian masalah enceng gondok telah dilakukan upaya penyelesaian bersama dinas instansi terkait dan pada tahun 2011 direncanakan pengadaan *crusher boat* untuk menunjang upaya tersebut.
2. Terhadap dukungan dan usulan dari Fraksi Partai Golongan Karya terkait program Gerakan Indonesia Menanam disampaikan terima kasih, namun berkaitan dengan belanja modal pengadaan ternak

yang tercantum dalam penjabaran Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011, seharusnya adalah belanja modal pengadaan tanaman dan direncanakan untuk pengadaan bibit tanaman sawo kecil dan dadap merah. Selanjutnya mengenai pencantuman program kegiatan tersebut akan disesuaikan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Atas permohonan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang pelayanan dokumen kependudukan, akan menjadi perhatian eksekutif dan akan ditindaklanjuti dengan meremajakan sarana dan prasarananya serta melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Atas saran dan usulan Fraksi Partai Golongan Karya tentang peningkatan honor PPKB dan Sub PPKB, hal tersebut akan diupayakan untuk terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat dapat disampaikan bahwa terdapat dua jenis pelayanan Keluarga Berencana yaitu pelayanan keluarga miskin pemilik kartu JAMKESMAS dimana untuk alat kontrasepsi dan jasa pelayanan medisnya tidak dipungut biaya sama sekali. Selanjutnya adalah pelayanan Keluarga Berencana Mandiri bagi keluarga mampu dimana untuk alat kontrasepsi dan jasa

pelayanan medisnya dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

1. Atas usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), perlu disampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya mengusulkan pendanaan pembangunan BLK tersebut kepada pemerintah pusat. Untuk saat ini akan dioptimalkan fungsi dari BLK yang sudah ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja.
2. Mengenai permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dapat disampaikan bahwa sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah masyarakat di wilayah tembakau yang antara lain berada di Kecamatan Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Modo, Sugio, Babat dengan harapan untuk menambah keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan derajat perekonomian masyarakat.
3. Atas apresiasi dan saran Fraksi Partai Golongan Karya terkait anggaran untuk program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo disampaikan terima kasih dan akan diupayakan untuk terus ditingkatkan pelayanan kepada warga panti.

Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

1. Terkait permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dapat disampaikan bahwa sasaran lokasi kegiatan adalah wilayah

yang terdapat industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku tembakau. Diantaranya Kecamatan Sambeng, Ngimbang, Mantup, Sugio, Modo, Bluluk, Sukorame, yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan wira usaha baru bagi pengrajin rokok.

2. Disampaikan terima kasih atas dukungan, saran dan apresiasi positif dari Fraksi Partai Golongan Karya terkait rencana pembangunan Pasar Desa, hal tersebut dilaksanakan dengan harapan untuk lebih dapat menggerakkan perekonomian kerakyatan utamanya di pedesaan.
3. Atas permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang kegiatan promossi dan misi dagang dapat disampaikan bahwa kegiatan tersebut dipergunakan untuk ikut berperan serta dalam kegiatan pameran baik berskala regional maupun nasional. Sedangkan untuk lokasi pemasangan billboard/baliho direncanakan di Kecamatan Paciran, Sukodadi, Karanggeneng dan Babat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Terhadap usulan Fraksi PDI Perjuangan tentang Penelusuran Jejak Situs Airlangga dan pembuatan monumen atau patung pahlawan yang asli Lamongan di jalan protokol jurusan Babat-Lamongan-Surabaya, hal tersebut akan menjadi perhatian eksekutif.
2. Atas permohonan penjelasan dari Fraksi Partai Golongan Karya terhadap jumlah kantin dan stand pada obyek wisata dapat dijelaskan bahwa di obyek wisata Makam Sunan Drajat jumlah kantin sebanyak 85 unit dan waduk gondang sebanyak 6 unit. Selanjutnya akan diupayakan peningkatan pada fasilitas prasarana

pendukung usaha dan penataan ulang terhadap kios pedagang pada obyek-obyek wisata.

3. Terhadap saran untuk pengenaan retribusi sewa pada toilet di obyek wisata Makam Sunan Drajat, penyediaan tempat penginapan bagi peziarah, peningkatan sarana dan prasarana pada obyek wisata serta pelestarian dengan mengelola situs sejarah Pemandian Air Panas Sendang Brumbun Desa Kranji Kecamatan Paciran, akan dilakukan pengkajian lebih lanjut.
4. Atas saran terkait dengan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Drajat Kecamatan Paciran pada pengelolaan Makam Sunan Drajat pada tahun 2011 untuk dituangkan dalam SK Bupati, hal tersebut telah ditetapkan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Desa Drajat.
5. Atas permohonan penjelasan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap anggaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dapat disampaikan bahwa kegiatan tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan belanja perawatan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.
6. Terhadap alokasi belanja bahan makanan dan minuman pada kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan disampaikan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi bahan makanan dan minuman satwa di Obyek Wisata Waduk Gondang.

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Terhadap permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan tentang cara mengukur target dari semua cabang olah raga dapat dijelaskan bahwa tolok ukur capaian kinerja dengan memprosentasekan jumlah

pemuda berprestasi dibidang olah raga dibanding jumlah seluruh pemuda, dimana jumlah pemuda berprestasi sebanyak 2.185 orang dibagi seluruh pemuda sebanyak 192.306 orang kali 100 prosen sama dengan 1,14 prosen.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang program pengembangan wawasan kebangsaan dapat dijelaskan bahwa bentuk kegiatan riilnya berupa sosialisasi yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan, sedangkan bentuk capaian program berupa peningkatan toleransi, kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas, ikatan sosial dikalangan masyarakat, kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta terlaksananya pengawasan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan dan orang asing.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan tentang tingkat keberhasilan dalam menangkap pengedar cukai ilegal, dapat dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah peredaran cukai ilegal adalah:
 - a. Menginventarisir 61 jenis rokok ilegal dari berbagai merk rokok yang beredar.
 - b. Menginventarisir 11 kota pembuatan rokok ilegal, baik di Kabupaten Lamongan maupun diluar Kabupaten.
 - c. Jumlah obyek yang terjaring sebanyak 76 obyek yang menjual rokok ilegal.
2. Terkait permohonan penjelasan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama mengenai kenaikan anggaran belanja langsung rutin, dapat

dijelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga dapat lebih bermanfaat.

Sekretariat Daerah

1. Atas saran yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ABT, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk menjaga dan memelihara ketersediaan, kesinambungan dan kelestarian daya dukung lingkungan akibat eksploitasi penggunaan Air Bawah Tanah oleh pengusaha di wilayah Kabupaten Lamongan.
2. Terkait restorasi kesesuaian terhadap program dan kegiatan SKPD khususnya yang ada pada bagian Bina Pengelolaan BUMD, akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian tolok ukur capaian kegiatan.
3. Terhadap dukungan Fraksi Partai Amanat Nasional atas peningkatan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) kepada seluruh aparat pemerintah desa, pemerintah daerah menyampaikan apresiasinya dengan maksud untuk memberikan motivasi bagi aparat pemerintah desa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Atas saran dari Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan perlu adanya penambahan personil/karyawan yang memadai di Kecamatan, akan ditindak lanjuti dengan menambah personil kecamatan secara bertahap melalui pelaksanaan rekrutmen CPNS

baru. Sedangkan untuk pengisian Sekretaris Desa yang masih kosong, masih menunggu petunjuk teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

5. Terhadap SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan yang telah dibentuk dengan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2010, telah ditindaklanjuti pula dengan penetapan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Lamongan. Adapun untuk kelengkapan organisasinya, akan segera ditindak lanjuti.
6. Mengenai persertifikatkan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah, hal ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan secara bertahap telah melakukan langkah-langkah penelusuran dan penelitian terhadap status hukum tanah yang dimiliki pemerintah daerah, dan selanjutnya untuk pengurusan berkas persyaratan pendaftaran sertifikat tanah milik pemerintah Kabupaten Lamongan telah diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional.
7. Atas usulan Fraksi Partai Demokrat tentang Pembangunan Ring Road Babat Selatan sampai Desa Gajah Bojonegoro yang menghubungkan pusat kegiatan bisnis di Pasar Agrobis Babat, pihak eksekutif sependapat. Untuk merealisasikan rencana tersebut pihak eksekutif telah melakukan pendekatan terhadap pemilik tanah yang belum dibebaskan.
8. Terhadap fungsi Kantor Perwakilan Jakarta, sampai saat ini berupaya terus meningkatkan manfaat yang maksimal bagi Pemerintah Daerah. Fungsi keberadaan kantor tersebut adalah mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Lamongan serta sebagai wadah masyarakat Lamongan yang ada di Jakarta untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan. Adapun anggaran yang dialokasikan dipergunakan untuk Biaya Operasional Kantor Perwakilan Lamongan di Jakarta.

9. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap keberadaan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas untuk menjalankan pengendalian Program Pembangunan Daerah dimana untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu adanya dana untuk operasional.
10. Tentang dana ADD yang dari tahun ke tahun besaran anggarannya selalu sama, hal ini sejalan dengan pemikiran Eksekutif untuk pemanfaatannya. Selanjutnya perlu kami sampaikan pembagian distribusi ADD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 140/640/SJ Perihal Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, yang pada prinsipnya menentukan besarnya Alokasi Dana Desa berdasarkan Rumus yang telah ditetapkan. Rumus yang dipergunakan berdasarkan Azas Merata dan Adil, yang didasarkan pada variabel Kemiskinan, Pendidikan, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi Partisipasi Masyarakat, Jumlah Unit Komunitas Desa.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

1. Usulan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar Hibah pada KONI diturunkan dapat disampaikan bahwa dana

tersebut apabila dibandingkan dengan total dana KONI Tahun 2010 sudah mengalami penurunan, dana KONI selain diproyeksikan untuk cabang olahraga sepakbola, juga untuk mengikuti Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011.

2. Atas permintaan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan tentang alokasi anggaran kegiatan di SKPD Kecamatan, hal tersebut dimaksudkan untuk perimbangan anggaran antar SKPD Kecamatan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas kinerjanya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Terhadap penggunaan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tahun 2009 dan 2010, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2009 dari realisasi penerimaannya tercatat masuk *7 Milyar 471 juta 848 ribu rupiah* dan realisasi sebesar *7 Milyar 446 juta 168 ribu rupiah*, sehingga terdapat sisa dana *24 juta 832 ribu rupiah*;
 - b. Tahun 2010 realisasi penerimaannya tercatat masuk *7 Milyar 648 juta 431 ribu 381 rupiah* dan realisasi *7 Milyar 673 juta 263 ribu 350 rupiah*, sehingga terdapat sisa lebih dana sebesar *24 juta 832 ribu rupiah* yang merupakan sisa realisasi tahun 2009;
 - c. Sedangkan penyerapan anggaran dana bagi hasil cukai pada semester I Tahun 2010 yang masih terserap 8,06 persen, hal tersebut disesuaikan dengan rencana kegiatan masing-masing SKPD.
4. Atas saran Fraksi Partai Amanat Nasional dengan adanya kebijakan kenaikan gaji PNS oleh Pemerintah Pusat agar PNS semakin

meningkatkan tugas dan fungsinya dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran eksekutif untuk senantiasa melakukan pembinaan kepada para PNS melalui jenjang hierarki SKPD-nya masing-masing.

5. Disampaikan terima kasih atas tanggapan terkait dengan pengalokasian anggaran, eksekutif berusaha untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa satu urusan bisa dilaksanakan lebih dari satu SKPD, sehingga terkesan terjadi tumpang tindih program antar SKPD tetapi sebetulnya tidak, bahkan hal tersebut saling mendukung untuk capaian target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Terhadap permohonan agar memprioritaskan dana pendamping untuk dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, hal tersebut telah diakomidir.
7. Terhadap usulan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya mengenai kualitas kendaraan baru bagi Kepala Desa se Kabupaten Lamongan, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan bahwa kendaraan tersebut disesuaikan untuk kendaraan operasional di lapangan. Sedangkan kendaraan dinas yang lama direncanakan untuk kendaraan operasional perangkat desa.
8. Sedangkan untuk usulan agar meningkatkan bantuan sosial dan keagamaan, hal tersebut telah menjadi perhatian eksekutif dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

9. Untuk usulan agar kendaraan dinas yang umurnya sudah tua agar dilakukan penghapusan, hal tersebut menjadi perhatian Eksekutif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kendaraan tersebut masih bisa dimanfaatkan.
10. Terhadap harapan Fraksi Partai Demokrat agar dilakukan pergeseran dari Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung, hal tersebut pada prinsipnya telah dilakukan oleh eksekutif dengan melakukan efisiensi dalam pengalokasian anggaran belanja tidak langsung. Kenaikan belanja tidak langsung diprioritaskan untuk pemenuhan belanja gaji pegawai, sharing dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat.
11. Atas harapan untuk alokasi belanja langsung pada SKPD yang melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan serta pembinaan dan pelayanan bagi masyarakat untuk ditambah, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Terhadap saran agar penyusunan anggaran belanja pada RAPBD Tahun Anggaran 2011 betul-betul efisien dan tidak boros, hal tersebut telah dilaksanakan dengan menyelaraskan antara program dan kegiatan yang ada pada RAPBD 2011 dengan dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2011 serta menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
13. Atas pertanyaan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait insentif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat disampaikan bahwa secara besaran prosentase insentif tersebut tidak melebihi batas

maksimal yang telah ditentukan. Diharapkan dengan diberikannya insentif tersebut, akan lebih memaksimalkan pemasukan pajak dan retribusi.

14. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani tentang total belanja daerah dapat dijelaskan bahwa total belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar *1 Trilyun 152 Milyar 145 Juta 605 ribu 963 rupiah* sesuai yang tertera di Lampiran I.
15. Mengenai saran terhadap kenaikan belanja pegawai tahun anggaran 2011 sehingga perlu dilakukan rasionalisasi, dapat disampaikan bahwa kenaikan belanja pegawai tersebut sebagian besar dipergunakan untuk menampung kebutuhan gaji pada tahun 2011, termasuk rencana kenaikan belanja gaji PNS sebesar 10 %.
16. Atas saran dan usul yang disampaikan tentang penurunan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dapat disampaikan bahwa kebijakan penurunan lebih disebabkan belum adanya belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Propinsi seperti pada tahun 2010. Apabila dalam perkembangan pembahasan Rancangan APBD Tahun 2011, mendapatkan informasi dan pagu untuk dana tersebut, alokasinya akan di tampung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.
17. Terhadap besarnya perkembangan komposisi Belanja Langsung yang mengalami penurunan, merupakan perhatian kita bersama. Kebijakan tersebut diseleraskan dengan kebijakan pemerintah pusat khususnya kebijakan kenaikan belanja gaji yang bersifat wajib dan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan

kepada masyarakat. Namun demikian perlu disampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk meningkatkan pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

18. Terhadap kenaikan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung hal ini terkait dengan kebutuhan dari program dan kegiatan masing-masing SKPD.

Badan Kepegawaian Daerah

1. Atas permintaan penjelasan dan saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan parameter yang digunakan Baperjakat untuk memberikan pertimbangan perpanjangan masa pensiun bagi pejabat eselon II dapat disampaikan perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dilakukan secara selektif dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan terutama berdasarkan pada pertimbangan keahlian, kemampuan dan pengalaman yang bersangkutan yang masih sangat dibutuhkan oleh organisasi, serta dalam rangka kesinambungan kinerja organisasi. Adapun dasar hukum perpanjangan batas usia pensiun PNS, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan eselon II adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, pada intinya diatur bahwa batas usia pensiun PNS adalah 56 Tahun, namun bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 Tahun.

2. Mengenai permintaan kedepannya agar tidak memperpanjang batas usia pensiun bagi pejabat struktural, akan menjadi perhatian dan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
3. Atas permintaan penjelasan dan saran dari Fraksi Partai PDI Perjuangan terkait dengan mutasi dan promosi jabatan yang kurang memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Peraturan yang berlaku. Terhadap hal tersebut dapat disampaikan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 mengatur bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat yang salah satunya serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
4. Sejalan dengan eksekutif dan disampaikan terima kasih atas perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani agar proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Lamongan tahun 2010 mulai dari penyusunan kebutuhan formasi, pengumuman syarat pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil tes penerimaan dilakukan secara transparan, kredibel, profesional dan oleh karena itu mekanisme, prosedur dan proses tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan mengenai prosedur Seleksi Penerimaan CPNS diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yakni dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan Pendaftaran;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Persiapan Ujian;
- d. Pelaksanaan Ujian;
- e. Pasca Pelaksanaan Ujian;
- f. Pengolahan LJK Hasil Ujian;
- g. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan.

Kantor Perijinan

Atas saran dan masukan Fraksi PDI Perjuangan terhadap penganggaran SKPD Kantor Perijinan pada program rutin terkait kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Baliho, Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tanaman, Pemeliharaan Rutin/berkala ISO, Pemeliharaan Rutin/berkala UPS dan pemeliharaan software. Kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan karena belum masuk pada pemeliharaan rutin/gedung kantor.

Kantor Ketahanan Pangan

Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan atas apresiasinya pada kegiatan pembangunan lumbung pangan, dapat disampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan gudang lumbung dari dana DAK Tahun Anggaran 2011 adalah tanah milik Kelompok Lumbung Pangan Desa / tanah milik desa, sedangkan bangunan berupa gudang dan peralatanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab kelompok lumbung pangan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Atas pernyataan dan saran Fraksi PDI Perjuangan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dimana salah satunya adalah melakukan kegiatan peningkatan peranan wanita keluarga sehat dan sejahtera serta pembinaan PKK. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan telah dilaksanakan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana utamanya pada penyusunan rencana program kegiatan SKPD.
2. Terhadap saran Fraksi Partai Golongan Karya agar program fasilitasi Alokasi Dana Desa ditiadakan karena double anggaran dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset dapat dijelaskan bahwa kegiatan fasilitasi tersebut ditujukan untuk pendamping penyaluran dana bantuan Alokasi Dana Desa guna kelancaran dan tertib administrasinya. Sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset merupakan bantuan keuangan yang di diterimakan langsung kepada masing-masing desa.
3. Terkait permohonan penjelasan tentang kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dapat disampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan pendamping PNPM Mandiri Pedesaan yang pada tahun 2010 ini masyarakat Lamongan menerima sebesar 45 Milyar 500 Juta

Rupiah dan pada tahun 2011 direncanakan menerima sebesar 36 Milyar Rupiah.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

1. Atas saran dan tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani tentang peningkatan budaya baca pada masyarakat, dapat disampaikan bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal Pelayanan Perpustakaan Keliling dengan menggunakan Mobil unit Perpustakaan Keliling untuk berkunjung pada lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Lamongan. Termasuk melakukan Pembinaan Perpustakaan Sekolah yang bertujuan untuk memajukan perpustakaan sekolah sebagai sarana meningkatkan minat baca anak didik.
2. Mengenai alokasi anggaran kegiatan yang berkenaan langsung dengan peningkatan pelayanan perpustakaan daerah, diharapkan koleksi buku perpustakaan secara bertahap akan dipenuhi. Terhadap kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum Kabupaten Lamongan dengan fasilitas gedung yang cukup representatif telah menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung.

Kantor Pengolahan Data Elektronik

Atas harapan dan saran dari Fraksi Partai Golongan Karya, terhadap pembangunan menara Wireless LAN untuk memperhatikan kualitas lapisan yang anti karat, akan ditindak lanjuti dalam pelaksanaannya.

Dinas Pertanian dan Kehutanan

1. Atas harapan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani tentang pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai, dapat dijelaskan bahwa sasaran dan capaian dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung pemberdayaan petani tembakau melalui bantuan sarana produksi pertanian dan mendukung permodalan yang diwujudkan berupa bantuan bibit tembakau kepada para anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTKI), dengan demikian diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat tembakau.
2. Atas pandangan dan permohonan penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang perlunya pengembangan agribis guna peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hal itu merupakan perhatian kita bersama sebagai upaya untuk meningkatkan bidang pertanian kearah yang lebih maju melalui pengembangan agribis. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan di setiap kecamatan melalui UPT Pertanian untuk memiliki sentra produk agribis unggulan yang harus dikembangkan sehingga perekonomian petani dapat terdongkrak naik kesejahteraannya sebagai perwujudan dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
3. Terhadap saran mengenai peningkatan Program Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), telah diakomodir dalam kegiatan yang didanai melalui DAK.
4. Dalam upaya mendorong percepatan proses rehabilitasi lahan kritis agar kondisi hutan memberikan fungsinya secara maksimal, telah

dilakukan upaya secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok tani/ masyarakat dilokasi lahan kritis. Disamping itu telah direalisasikan pembuatan Hutan Rakyat yang sampai saat ini telah mencapai luasan sebesar 5 ribu 155 hektar, pembuatan Kebun Benih Rakyat (KBR) sebanyak 27 unit atau setara dengan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) kurang lebih 3 ribu 375 hektar yang tersebar di 27 desa pada 22 Kecamatan.

5. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani tentang kegiatan Intensifikasi Tembakau Virginia dan Tembakau Jawa, dapat dijelaskan bahwa kegiatan tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan pupuk dengan cakupan 150 Ha yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tembakau. Sedangkan saran yang disampaikan mengenai terjadinya penyimpangan iklim sebagaimana tahun 2010, akan dipertimbangkan secara teknis dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan serta fase pertumbuhan tanaman tembakau.
6. Tentang permohonan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya mengenai jumlah kelompok tani serta sistem pengelolaan dan bimbingan teknis berkaitan dengan pemberian bantuan handtraktor yang bersumber dari Dana DAK dan Dana Alokasi Cukai, dapat disampaikan bahwa jumlah kelompok tani di Kabupaten Lamongan sebanyak Seribu 529 kelompok, dimana sistem pengelolaan dan bimbingan teknisnya dilaksanakan oleh kelompok Unit Pelayanan Jasa Alsintan di wilayahnya masing-masing.

7. Atas permintaan penjelasan untuk kegiatan Pembinaan Petani Pengelola Alat dan Mesin Perkebunan (ALSINBUN) yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, disamping dipergunakan untuk pelatihan bagi petani juga untuk pengadaan handtraktor sebanyak 23 unit yang akan dibantukan kepada petani di wilayah tembakau.
8. Atas pandangan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait relevansi antara pengadaan sarana notebook/laptop dengan peningkatan kinerja, dapat disampaikan bahwa pengadaan sarana tersebut digunakan sebagai sarana penyuluhan dengan media visualisasi, sehingga dengan metode ini petani bisa mendengar, membaca dan melihat materi penyuluhan secara langsung. Dengan demikian diharapkan materi penyuluhan tersebut lebih mudah untuk dimengerti, dipahami dan diimplementasikan oleh petani.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Atas permohonan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan pengalokasian anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Alokasi Cukai, telah diakomodir dalam rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2011.
2. Terhadap saran Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan penyediaan bibit ternak kambing/domba, dapat disampaikan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Cukai yang akan didistribusikan kepada masyarakat di wilayah tembakau, terutama untuk masyarakat pedesaan kategori miskin. Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring dan pembinaan secara

berkesinambungan agar populasi ternak tersebut dapat berkembang.

3. Terkait saran tentang output dari pembangunan rumah kompos untuk ditingkatkan menjadi pupuk organik, akan menjadi perhatian eksekutif.
4. Terhadap program pembelian mesin pakan ternak sebanyak 4 unit akan didistribusikan untuk kelompok peternakan sapi di Kecamatan Modo, Mantup, Sarirejo dan Tikung.
5. Mengenai permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang lahan untuk pembangunan RPH Babat dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya pihak petrokimia Gresik sudah memahami dan menerima terkait dengan rencana pembangunan dimaksud. Selanjutnya pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk pengolahan limbah, tidak boleh mengganggu atau mengurangi fungsi rawa sebagai sumber air dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk komitmen yang telah disepakati dengan pihak Petrokimia Gresik.

Dinas Perikanan dan Kelautan

1. Atas permintaan Fraksi PDI Perjuangan dapat disampaikan bahwa judul Program Pengembangan dan Sistem Penyuluhan Perikanan, akan dilakukan koreksi dan disesuaikan.
2. Terkait permohonan penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang upaya revitalisasi bidang perikanan dan kelautan agar nasib nelayan bisa lebih sejahtera, telah dilakukan dan direncanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap yang antara lain berupa pengadaan rumpon dasar, jaring

payang teri, lampu celup dalam air, timbangan mekanik, rehabilitasi TPI dan membentuk Kelompok Usaha Bersama.

3. Atas saran yang disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya terhadap program Pembuatan Keramba, merupakan suatu upaya dalam mendorong percepatan peningkatan produksi budidaya, khususnya budidaya air tawar, dan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun memperluas lapangan kerja. Kegiatan ini juga didukung dengan Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Pakan Ikan. Agar kegiatan Pembuatan Karamba dapat dikelola sebaik - baiknya dan mampu memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, akan dijabarkan lebih lanjut pada Perda tentang Ijin Usaha Perikanan termasuk di dalamnya Ijin Pengelolaan Karamba.
4. Mengenai saran mengenai sistim pendistribusian alat tangkap perikanan payang teri tersebut, akan didistribusikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk oleh nelayan dengan mengetahui HNSI dan Rukun Nelayan, sebanyak 24 KUB yang ada di kecamatan Brondong dan Paciran.
5. Tentang usulan pembangunan break water di Desa Weru Kecamatan Paciran, hal tersebut akan menjadi perhatian Eksekutif. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2011 direncanakan untuk membangun break water di Desa Banjarwati dan Desa Tunggul Kecamatan Paciran.
6. Untuk permintaan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang sewa lahan TPI dan pabrik es, dapat dijelaskan bahwa besaran sewa lahan tersebut didasarkan pada standar harga yang ditetapkan oleh Perum Prasarana Perikanan Cabang Brondong

dengan luas lahan sebesar 800 meter persegi untuk Pabrik Es dan Seribu 480 meter persegi untuk lahan 2 TPI. Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah adanya kontribusi kepada PAD yang berupa setoran retribusi TPI dan retribusi Pabrik Es Tirta Maharani, yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan harga sewa lahan tersebut.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan mengenai status pinjaman daerah sebesar 46,5 Milyar pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dapat disampaikan bahwa hal tersebut belum direkomendasi oleh Departemen Dalam Negeri karena pinjaman harus masuk pada APBD induk, selanjutnya akan dialokasikan kembali sebesar 40 Milyar pada RAPBD Tahun Anggaran 2011. Terkait ditundanya utang jangka menengah tersebut terhadap kesehatan fiskal daerah, masih cukup aman.
2. Sedangkan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional agar pinjaman diarahkan untuk sektor primer, seiring dengan hal tersebut, pemerintah daerah akan berfokus pada sektor riil dengan lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
3. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama mengenai pinjaman daerah yang akan dilaksanakan, jangka waktu pinjaman tersebut adalah selama 4 tahun dengan tingkat bunga sekitar 9 %. Dengan tingkat bunga tersebut kiranya masih normal dan rasional dalam pasar perbankan.
4. Atas permintaan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani untuk kelangsungan pelaksanaan pinjaman daerah agar juga

memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dapat disampaikan bahwa mengingat besarnya defisit riil yang cukup besar, maka kebijakan untuk menutup melalui peningkatan pendapatan daerah belum mampu untuk mengatasi defisit aliran kas yang ada. Sehingga kebijakan pinjaman daerah perlu dilakukan dalam kerangka penyehatan keuangan daerah. Selanjutnya terhadap saran yang disampaikan agar pemerintah daerah berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan peningkatan pendapatan daerah sebagaimana yang tertuang didalam KUA 2011, akan terus diupayakan seoptimal mungkin guna peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung perkembangan pembangunan.

5. Terhadap permohonan usulan Fraksi Partai Amanat Nasional agar kegiatan – kegiatan revolving dilakukan penambahan, dengan mempertimbangkan usulan dari SKPD pengelola, maka kegiatan revolving tersebut telah disesuaikan dengan rencana yang sudah diprogramkan.
6. Atas permohonan penjelasan Fraksi Partai Demokrat terkait rencana penyertaan modal pada komponen pengeluaran pembiayaan daerah dipergunakan untuk penyaluran dana revolving kepada kelompok masyarakat yang akan diterima kembali pada rekening penerimaan piutang daerah. Selanjutnya pembayaran pokok utang pada komponen pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dari rencana pinjaman daerah.

D. LAIN-LAIN

1. Terhadap permohonan penjelasan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tentang kegiatan-kegiatan pada SKPD-SKPD yang tidak ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dijelaskan bahwa berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa untuk Lampiran mengenai daftar nama rekening kegiatan dan kode rekening belanja tidak merupakan acuan baku, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.
2. Dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dan langkah nyata dalam bentuk percepatan dan penuntasan pembangunan jalan poros desa dalam tahun 2011 baik melalui dana Pemerintah Daerah maupun bantuan Pemerintah Propinsi.
3. Atas permohonan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang peningkatan kualitas pekerjaan fisik proyek dan pembangunan jalan poros desa menjadi perhatian eksekutif dan untuk pelaporan secara rutin maupun berkala akan dilakukan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing.
4. Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat atas saran dan masukannya agar penyelesaian rencana relokasi pedagang pasar Babat dapat dilakukan pendekatan secara persuasif edukatif, dengan ditindaklanjuti penghentian Surat Peringatan (SP III) dan terus berupaya melakukan pendekatan untuk dapat dicapai jalan terbaik dalam penyelesaiannya.

5. Terhadap usulan agar Eksekutif melakukan pembahasan dengan Pemerintah Propinsi (PT. PWU) serta DPRD terkait Pengelolaan PT. LIS, dapat disampaikan bahwa saat ini telah dilakukan kajian hukum terhadap beberapa perjanjian dan pemenuhan saham oleh PT. PWU, agar ada kesamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan PT. PWU selaku pemegang saham dalam menata PT. LIS secara profesional.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan pihak Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Yang Terhormat yang dapat saya sampaikan pada Sidang Paripurna Tahun Sidang 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011. Adapun terhadap masukan, saran, dan himbauan yang belum tertampung dalam jawaban ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui rapat-rapat komisi dan badan anggaran DPRD.

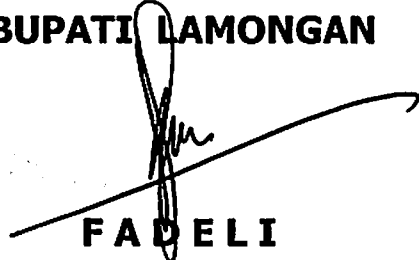
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap Hadirin dan Anggota Dewan Yang Terhormat atas kesediaan, kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban dalam sidang yang terhormat ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua dalam membangun Lamongan sehingga menjadi daerah yang semakin maju, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI LAMONGAN



FADELI